

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Fedry Saputra

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

fedrysaputra@yahoo.co.id

Abstrak:

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Pendidikan masa Belanda memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat dengan tujuan westernisasi dari kristenisasi yaitu untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Pendidikan zaman Jepang disebut “Hakko Ichiu”, yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum dengan tujuan mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru. Pada masa reformasi gelombang peradaban masa depan merupakan satu kesatuan dari gejolak magma cultural dari dalam dan kekuatan globalisasi yang menerjang dari luar. Kehidupan pesantren masa depan tidak terlepas dari kedua gelombang peradaban ini. pendidikan pesantren akan survive dan menjadi pendidikan alternatif dari masyarakat Indonesia apabila dia peka terhadap gelombang peradaban tersebut. Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.

Kata Kunci: Sejarah, Pendidikan Islam, Indonesia, Belanda, Jepang

A. Latar Belakang Masalah

Berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia (Italia) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragama Islam (Mansur, 2004). Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia, namun banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara Dunia Arab dengan Asia Timur. Pulau Sumatra misalnya, karena letak geografisnya, sejak awal abad pertama Masehi telah menjadi tumpuan perdagangan antarbangsa dan pedagang-pedagang yang datang ke Sumatra (Alfian, 2005).

Meneliti sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari umat Islam, baik dari perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangan pendidikan. Melihat kenyataan betapa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan berjuang secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya disamping mengadakan perlawanan militer.

Perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Yang dikaji melalui pendekatan metode oleh sebab itu pada setiap disiplin ilmu jelas membutuhkan pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan mengaktualisasikan serta memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naluri, dengan ditunjang kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diharapkan.

B. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan Barat itu berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pemabaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Di samping itu sebagai bangsa penjajah pada umumnya mereka menganut pikiran Machievelli yang menyatakan antara lain:

1. Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah
2. Agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukan rakyat.
3. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah.
4. Janji dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan.
5. Tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar
2. Sekolah Latin

3. Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari)
4. Academie der Marine (Akademi Pelayanan)
5. Sekolah Cina
6. Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam yang telah ada dipondok pesantren, masjid, musholah, atau yang lainnya tidak membantu pemerintah Belanda menjadi acuan pada waktu itu. Dengan begitu mereka terapkan berbagai peraturan dan kebijakan diantaranya:

- a. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus pendidikan Islam yang mereka sebut *priesterraden*. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1902 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda.
- b. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.
- c. Kemudian pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar (*wilde school ordonantie*)

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan model barat membawa arti positif bagi perkembangan pendidikan Islam dan kemajuan masyarakat terjajah.

Orang-orang pribumi yang belajar disekolah-sekolah Belanda menjadi mengenal sistem kelas, pemakaian meja dan bangku, metode belajar mengajar modern, dan ilmu pengetahuan. Selain itu mereka juga mengenal surat kabar atau majalah yang sangat bermanfaat untuk mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya dapat melahirkan muslim yang memiliki pola pikir dan wawasan rasional. Pandangan rasional yang menjadi salah satu pendorong untuk mengadakan pembaharuan diberbagai bidang, diantaranya adalah perubahan dibidang kegamaan.

Pada awal abad ke-20 Indonesia telah dimasuki oleh ide-ide pembaharuan pemikir Islam, sekaligus ide-ide juga memasuki dunia pendidikan. Salah satu yang terlihat dari pembaharuan pendidikan itu adalah munculnya upaya-upaya pembaharuan dalam bidang materi, metode.

Dampak dari munculnya ide-ide pembaharuan dalam bidang Islam yang tidak lagi berorientasi pilah antara ilmu agama dan umum, tetapi setidaknya walaupun belum seimbang, sudah memunculkan pemikiran untuk menganggap penting kedua ilmu tersebut. Fenomena inilah yang berlangsung pada awal abad ke-20 dan ini menjadi dasar bagi pengembangan penyatuan kedua ilmu ini untuk seterusnya.

Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, adalah:

1. Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik semata-mata.

2. Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama.
3. Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah, dengan menampilkan sistem baru. Ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula unsure-unsur yang diambil dari sekolah.

C. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang

Kejayaan penjajah Belanda lenyap setelah Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik. Hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya (Mustafa dan Abdullah Ally, 1998).

Mengenai pendidikan zaman Jepang disebut *Hakko Ichiu* yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu pelajar setiap hari terutama pada pagi hari harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak perbedaannya dibandingkan dengan penjajahan Belanda (Hasbullah 2001)

Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala daya upaya ditujukan untuk kepentingan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan yang sedikit sekali, hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan atau bekerja.

Kegiatan-kegiatan sekolah antara lain:

- Mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang;
- Membersihkan bengkel-bengkel, asrama-asrama militer;
- Menanam ubi-ubian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan;
- Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat pada zaman Jepang ini yaitu terjadinya perubahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan, yaitu:

a) Pelatihan guru-guru:

Usaha penanaman Ideologi *Hakko Ichiu* melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan guru-guru. Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi baru tersebut. Pelatihan tersebut dipusatkan di Jakarta. Setiap kabupaten wajib mengirimkan wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Gemblengan ini berlangsung selama 3 bulan, jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk menJepangkan para guru.

Dengan demikian, habislah riwayat susunan pengajaran Belanda yang dualistis itu, yang membedakan dua jenis pengajaran, yakni pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra.

Hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Rakyat 6 tahun, yang ketika itu populer dengan nama *kokumin Gakko*. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama.

Jenjang pengajaran pun menjadi (Hasbullah 2001):

- a. Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk sekolah pertama)
 - b. Sekolah menengah 3 tahun
 - c. Sekolah menengah tinggi 3 tahun (SMA-nya pada zaman Jepang).
- b) Perubahan-perubahan penting:
- a. Hapusnya dualisme pengajaran: berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali;
 - b. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar pada semua jenis sekolah. Bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang harus ditaati.
- c) Isi pengajaran:
- a. Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan juga untuk kepentingan perang;
 - b. Untuk melipatgandakan hasil bumi, murid-murid diharuskan membuat pupuk kompos atau beramai-ramai membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu belajar dipergunakan untuk menanam halaman sekolah dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jeruk;
 - c. Pelatihan-pelatihan jasmani berupa pelatihan kemiliteran dan mengisi aktivitas murid sehari-hari;
 - d. Untuk menanamkan semangat Jepang, tiap hari murid-murid harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang. Mereka harus menguasai bahasa dan nyanyian Jepang. Tiap-tiap pagi diadakan upacara, dengan menyembah bendera Jepang dan menghormati Istana Tokyo.
 - e. Agar bahasa Jepang lebih populer, diadakan ujian bahasa Jepang untuk para guru dan pegawai-pegawai, yang dibagi atas 5 tingkat. Pemilik ini akan mendapat tambahan upah. (Mustafa dan Abdullah Ally. 1998)

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain:

1. Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari.
2. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang;
3. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.
4. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakki dan Bung Hatta.
5. Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan
6. Diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Tujuan pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain:

- a. Azaz tujuan muhamadiyah: mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan azaz perjuangan dakwah Islamiyyah dan amar ma'ruf nahi Munkar
- b. INS (*Indonesische Nadelanshe School*) dipelopori oleh Muhammad syafi'I 1899-1969) bertujuan mendidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan.
- c. Tujuan Nahdlatul Ulama', sebelum menjadi partai politik memegang teguh mazhab empat, disamping mejadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

D. Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa : Madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah. (A. Timur Djaelani 1980)

Kenyataan ini timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, (A. Ridwan Saidi, 1984) yaitu :

- a. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
- b. Politik non kooperatif para ulama' terhadap Belanda yang memfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda , termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewengan agama.

Kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern. Seperti yang tertera dalam tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : *Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.* (Endang Sudardja 1984)

Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama disekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima (Muhammad Yunus 1985). Selain itu pendidikan agama disekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Untuk itu dibentuk Departemen Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren.

Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan (Musyrifah Sunanto, 2005) sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.
2. Nadrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.

Jenjang pendidikan dalam system madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi. (Deliar Noer, 1983) Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum. (Karel A. Steenbrink 1994)

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. (Maksum 1999) PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

E. Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Baru)

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. (Mahmud Yunus, 1995)

Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

- Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah
- Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif
- Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik
- Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang
- Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang
- Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam

Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

1. Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional

Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru. Artinya pendidikan Islam harus mampu :

- Membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu
- Membangkitkan indra dan perasaan anak didik sebagai sarana berfikir
- Membekali ilmu pengetahuan

Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.

- a. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
- c. Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
- d. Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
- e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
- f. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

2. Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.

Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

F. Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Reformasi)

Apabila kita berbicara mengenai pendidikan Islam maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang indigenous adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Budha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah bentuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian archaic, juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politik selain daripada suatu masyarakat pendidikan dengan nuansa agama. Madrasah juga lebih berkonotasi kepada cara penyampaian ilmu maupun agama secara klasikal dan lebih modern. Namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu telah tumbuh dan dimiliki oleh masyarakat sekitar terutama di daerah pedesaan karena pengaruh historis. Oleh sebab itu pendidikan pesantren dan madrasah cenderung bersifat tradisional dan ortodoks sungguh pun tidak selalu benar sebagaimana yang kita lihat di dalam perkembangan pesantren modern seperti Pesantren Tebuireng.

Pesantren dan madrasah adalah milik kebudayaan Indonesia. Dan oleh karena pendidikan adalah sebenarnya merupakan gagasan kebudayaan, maka mendidik berarti pula menggagas kebudayaan masa depan. Di sinilah letaknya arti pesantren di dalam membangun kebudayaan masa depan. Seperti Malik Fadjar mengatakan gelombang peradaban masa depan merupakan satu kesatuand ari gejolak magma cultural dari dalam dan kekuatan globalisasi yang menerjang dari luar. Kehidupan pesantren masa depan tidak terlepas dari kedua gelombang peradaban ini. pendidikan pesantren akan survive dan menjadi pendidikan alternatif dari masyarakat Indonesia apabila dia peka terhadap gelombang peradaban tersebut. Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.

1. Kekuatan Pendidikan Islam : Pendidikan Yang Lahir Dari Masyarakat

Dalam era reformasi dewasa ini dan sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia maka kita berbicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk pendidikan.

2. Kelemahan : Cenderung Kepada Ortodoksi

Apabila kita teliti kekuatan dari pendidikan pesantren dan madrasah justru disitulah pula terletak kelemahannya. Dalam perjalanan sejarah, sistem pendidikan pesantren dan madrasah telah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, maupun pada masa kemerdekaan. Kelemahannya terletak kepada keunikannya bahwa pesantren dan madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri.

Sesuai dengan permasalahan-nya, menurut pendapat penulis pengelolaan pendidikan Islam meliputi empat bidang prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas,
2. Pengembangan inovasi dan kreativitas,
3. Membangun jaringan kerja sama (networking),
4. Pelaksanaan otonomi daerah.

G. Kesimpulan

1. Pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda tidak mendapat rintangan. Hal ini ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat abiturienya tidak bisa diterima oleh mereka dan yakin kalau kesadaran dari pihak Islam telah timbul untuk tidak bekerja pada Belanda yang telah menjadi perintang kemajuan bangsa. Kenyataan seperti ini sayang masih berlaku sampai sekarang sehingga orang-orang Islam kurang berperan dalam pemerintahan. Hal ini tentu penyebabnya adalah melemahnya kekuatan politik Islam walaupun Islam di Indonesia mencapai jumlah yang sangat banyak.
2. Pada masa Jepang tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa ke-Islaman yang benar guna kepentingan dunia dan Akhirat, dan yang kedua membelah bangsa dan tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa itu sendiri ataupun kemerdekaan secara manusiawi.
3. Pendidikan masa orde lama yaitu sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. Ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
4. Sistem pendidikan orde baru menerapkan sistem integritas. Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata

lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.

5. Pendidikan Islam maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang indigenous adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Budha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah bentuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian archaic, juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politik selain daripada suatu masyarakat pendidikan dengan nuansa agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaelani Timur. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. (Jakarta: Dermaga, 1980)
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jogjakarta: Global Pustaka Utama 2004)
- Maksum. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Mustafa dan Abdullah Ally. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Noer Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali, 1983).
- Saidi Ridwan. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. (Jakarta : Rajawali, 1984).
- Steenbrink Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994)
- Sudarja Endang, *UUD RI '45 dalam hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila*. (Bandung : Ghalia Indonesia, 1984).
- Sunanto Musyirifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Teuku Ibrahim Alfian, *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*, (Ceninnets: Jogjakarta, 2005)
- Tim Penyusun Departemen Agama. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta :DEPAG RI, 1986)
- Yunus Muhammad. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1985).